DINAMIKA HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA: KAJIAN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL, KULTURAL, DAN HUKUM

Alfa Rizky Voth*¹

Mochammad Firmansyah Dwi Setiawan²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*e-mail: 21071010232@student.upnjatim.ac.id¹, 21071010286@student.upnjatim.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak perubahan sosial, terutama urbanisasi, globalisasi, dan perubahan nilai, terhadap pola waris adat di masyarakat Indonesia. Menggunakan studi kasus dan tinjauan literatur, penelitian ini mengidentifikasi dampak perubahan sosial tersebut pada struktur keluarga, norma-norma tradisional, dan pola hubungan antar anggota keluarga. Urbanisasi, sebagai contoh, menyebabkan perubahan norma-norma di masyarakat perkotaan, yang memengaruhi cara waris adat diberikan kepada anak. Globalisasi, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, juga memberikan dampak signifikan pada budaya dan komunikasi masyarakat Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman holistik terhadap dinamika perubahan sosial, budaya, dan hukum sangat penting dalam menghadapi tantangan dan menjaga keberagaman budaya di Indonesia. Dalam konteks hukum adat, penelitian ini menyoroti perlunya pemanfaatan hukum adat sebagai identitas suatu masyarakat, dengan memperhatikan keseimbangan antara hukum nasional dan lokal. Oleh karena itu, pelestarian kebudayaan lokal melalui hukum adat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat adat dan keberagaman budaya di Indonesia.

Kata kunci: Hukum, Adat, Hukum Adat Waris, Budaya

Abstract

This research examines the impact of social change, particularly urbanization, globalization and changing values, on customary inheritance patterns in Indonesian society. Using case studies and a literature review, the research identifies the impact of these social changes on family structures, traditional norms and patterns of relationships between family members. Urbanization, for example, leads to changing norms in urban communities, which affects the way customary inheritance is given to children. Globalization, with its advances in information and communication technology, has also had a significant impact on Indonesian culture and communication. This research confirms that a holistic understanding of the dynamics of social, cultural and legal change is essential in facing challenges and maintaining cultural diversity in Indonesia. In the context of customary law, this research highlights the need to utilize customary law as the identity of a society, by paying attention to the balance between national and local laws. Therefore, the preservation of local culture through customary law can provide significant benefits for indigenous peoples and cultural diversity in Indonesia.

Keywords: Legal Dynamics, Custom, Customary Inheritance Law, Culture

PENDAHULUAN

Kebudayaan Indonesia mencakup keberagaman budaya lokal di setiap daerah. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah, menguatkan konsep kesatuan dan ketunggalikaan daripada kebhinekaan. Ini tercermin dalam negara kesatuan, ekonomi, hukum, dan bahasa nasional. Perubahan dalam kebudayaan terjadi seiring dengan dorongan masyarakat dan cepatnya globalisasi yang memasukkan unsur-unsur global ke dalam kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dampak globalisasi melibatkan perkembangan teknologi canggih yang memberikan manfaat tetapi juga dapat merusak mental dan moral generasi muda. Contohnya, di NTT, budaya gotong royong dalam pertanian mulai tergantikan oleh penggunaan mesin. Globalisasi juga memengaruhi solidaritas masyarakat, seperti solidaritas mekanik yang berbasis kekeluargaan dan solidaritas organik yang didasarkan pada kepentingan. Oleh karena itu, perlu kajian mendalam sebelum menerima unsur budaya dari luar.

Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat di setiap daerahnya, termasuk dalam aspek hukum waris adat. Pluralisme hukum di Indonesia menciptakan variasi dalam

hukum waris adat, dengan setiap daerah memiliki sistem adat yang berbeda. Meskipun menggunakan sistem kewarisan individual, hukum waris adat memberikan pengakuan pada kedudukan anak perempuan dan laki-laki, meskipun pembagian warisan lebih besar untuk anak laki-laki. Hak mewaris diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan harta yang diwarisi, walaupun anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan anak laki-laki.

Perubahan sosial dan kultural juga turut memengaruhi dinamika hukum waris di Indonesia. Meskipun hukum waris adat tetap dipertahankan dari generasi ke generasi, terdapat pengaruh perubahan zaman. Hubungan antara hukum dan perubahan sosial menjadi sangat relevan, meskipun pandangan positivisme hukum berusaha memisahkan aspek dinamis hukum dari aspek dinamis ilmu sosial. Oleh karena itu, artikel ini akan menjelaskan dinamika hukum waris adat di Indonesia, fokus pada perspektif perubahan sosial, kultural, dan hukum (Sutardi, 2017).

Namun, hak mewaris dalam harta warisan para ahli waris mendapatkan hak masing-masing, meskipun anak perempuan hanya mendapatkan bagian tidak sama besar dengan anak laki-laki. Perubahan sosial dan kultural juga mempengaruhi hukum waris di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, hukum waris adat di Indonesia masih berlangsung dan dipertahankan dari generasi sebelumnya. Hubungan hukum dan perubahan sosial sudah tidak bisa dipisahkan, akan tetapi, dalam pemikiran positivisme hukum itu harus terpisah dari sosial, karena hukum itu bersifat dinamis tapi harus berujung pada statis sedangkan ilmu sosial bersifat dinamis. Oleh karena itu, perubahan sosial dan kultural dalam masyarakat tidak terfokus dalam kehidupan masyarakat saja, tetapi juga mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia. Artikel ini akan membahas dinamika hukum waris adat di Indonesia, khususnya dalam perspektif perubahan sosial, kultural, dan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, maka permasalahan yang dianalisis dalam artikel ini meliputi:

1. Bagaimana perubahan sosial di masyarakat Indonesia mempengaruhi pola waris adat, dan apakah terdapat pergeseran nilai-nilai yang mendukung atau menentang tradisi waris adat?
2. Apa kontribusi hukum waris adat terhadap pemeliharaan keberagaman budaya di Indonesia, dan sejauh mana hukum tersebut mampu menjaga identitas lokal dalam konteks globalisasi?

METODE

Jenis penelitian dipakai pada perumusan bentuk penelitian yang nantinya akan terarahkan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang memiliki sistematika yang baik dan secara konseptual mudah dimengerti oleh pembacanya. Dalam merancang penelitian ini, penulis memakai penelitian hukum normative dengan memprioritaskan penelusuran kajian kepustakaan melalui penggunaan pendekatan konsep dan pendekatan historis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa dalam penelitian hukum normatif, data utama dapat diperoleh dari bahan pustaka yang kemudian tergolong menjadi data sekunder (Soekanto & Mahmudji, 2013). Perolehan, pengumpulan, dan penyusunan bahan Pustaka tersebut dilakukan secara sistematis untuk kemudian dianalisis dan dikaji untuk mengetahui keterkaitan antar tiap bahan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pola Waris Adat

Perubahan sosial, seperti urbanisasi, globalisasi, dan perubahan nilai, mempengaruhi pola waris adat di masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa dampak perubahan sosial terhadap pola waris adat (Wahyudi & Firdaus, 2022):

1. Urbanisasi

Urbanisasi dapat mengubah struktur keluarga dan pola hubungan antar anggota keluarga, yang pada gilirannya mempengaruhi pola waris adat. Dalam kota, masyarakat perkotaan mengalami perubahan norma-norma yang tradisional, yang mungkin mempengaruhi cara waris adat yang diberikan kepada anak.

2. Globalisasi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengaruh globalisasi, telah membawa perubahan sosial budaya yang signifikan di Indonesia. Akses mudah terhadap internet, media

sosial, dan konten digital telah mempengaruhi cara komunikasi, gaya hidup, dan budaya populer di negara ini. Perubahan sosial budaya ini mungkin mempengaruhi pola waris adat dan cara masyarakat menangani hak anak perempuan.

3. Perubahan Nilai

Perubahan sosial juga dapat terjadi dalam pandangan tentang peran gender, pernikahan, sistem nilai, pendidikan formal dan non-formal, organisasi politik, struktur keluarga, pola konsumsi, dan preferensi budaya lainnya. Misalnya, perubahan nilai dan norma mungkin mempengaruhi cara masyarakat menangani hak anak perempuan dan waris adat yang diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam menjawab pertanyaan tentang dampak perubahan sosial terhadap pola waris adat, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial, seperti urbanisasi, globalisasi, dan perubahan nilai, mempengaruhi pola waris adat di masyarakat Indonesia. Namun, hal ini juga membawa tantangan mengenai pergeseran nilai-nilai yang mendukung atau menentang tradisi waris adat, yang mungkin terjadi seiring waktu.

Pergeseran Nilai-nilai yang Mendukung atau Menentang Tradisi Waris Adat

Pergeseran nilai-nilai yang mendukung atau menentang tradisi waris adat merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat Bali, terdapat pergeseran nilai adat yang dianggap wajar apabila tidak terlalu menentang peraturan adat yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap tradisi waris adat. Untuk menjelaskan lebih lanjut, kita dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait dengan pergeseran nilai-nilai dalam konteks waris adat di Indonesia. Pertama, perubahan sosial dan budaya dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam warisan. Misalnya, dalam masyarakat adat patrilineal, di mana pewarisan harta dilakukan melalui garis keturunan laki-laki, perubahan nilai-nilai seputar kesetaraan gender dapat memengaruhi cara masyarakat memandang hak waris Perempuan. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran nilai-nilai yang mendukung kesetaraan gender dalam konteks waris adat. Kedua, perubahan sosial juga dapat memengaruhi cara masyarakat memandang pentingnya mempertahankan tradisi waris adat. Seiring dengan modernisasi dan globalisasi, nilai-nilai tradisional seringkali dihadapkan pada nilai-nilai baru yang dibawa oleh perubahan sosial dan budaya. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai yang mendukung atau menentang tradisi waris adat, terutama dalam konteks pemertahanan nilai-nilai tradisional di tengah arus perubahan sosial yang dinamis (Muzainah, 2016).

Terakhir, pergeseran nilai-nilai juga dapat terjadi akibat adanya dinamika hukum waris adat itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat patrilineal mengalami pergeseran sistem pewarisan ke arah individual. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem pewarisan dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang terkait dengan waris adat. Dengan demikian, pergeseran nilai-nilai yang mendukung atau menentang tradisi waris adat merupakan hasil dari interaksi kompleks antara perubahan sosial, budaya, dan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika perubahan sosial dan budaya dalam konteks waris adat, serta bagaimana perubahan tersebut dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang terkait dengan warisan (Judiasih., et al, 2021).

Dinamika Hukum Waris Adat di Tengah Perubahan Sosial

Dalam konteks dinamika hukum waris adat, perubahan sosial memengaruhi evolusi hukum waris adat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat patrilineal mengalami pergeseran sistem pewarisan ke arah individual. Oleh karena itu, perubahan sosial turut memengaruhi dinamika hukum waris adat di masyarakat Indonesia. Pergeseran sistem pewarisan dari patrilineal ke arah individual menunjukkan adanya perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap hak waris dan peran individu dalam menerima warisan. Hal ini juga menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai yang mendukung kesetaraan gender dalam konteks waris adat. Selain itu, perubahan sosial juga memengaruhi cara masyarakat memandang pentingnya mempertahankan tradisi waris adat. Seiring dengan modernisasi dan globalisasi,

nilai-nilai tradisional seringkali dihadapkan pada nilai-nilai baru yang dibawa oleh perubahan sosial dan budaya. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai yang mendukung atau menentang tradisi waris adat, terutama dalam konteks pemertahanan nilai-nilai tradisional di tengah arus perubahan sosial yang dinamis (Mustomi, 2017).

Dalam konteks hukum waris adat, perubahan sosial juga memengaruhi evolusi hukum waris adat di Indonesia. Seiring dengan perubahan sosial dan budaya, hukum waris adat juga mengalami perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap hak waris dan peran individu dalam menerima warisan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai yang mendukung kesetaraan gender dalam konteks waris adat. Selain itu, perubahan dalam sistem pewarisan dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang terkait dengan waris adat.

Perubahan sosial memengaruhi evolusi hukum waris adat di Indonesia. Pergeseran sistem pewarisan dari patrilineal ke arah individual menunjukkan adanya perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap hak waris dan peran individu dalam menerima warisan. Hal ini juga menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai yang mendukung kesetaraan gender dalam konteks waris adat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang dinamika perubahan sosial dan budaya dalam konteks waris adat sangat penting untuk memahami evolusi hukum waris adat di Indonesia.

Kontribusi Hukum Waris Adat Terhadap Pemeliharaan Keberagaman Budaya di Indonesia, dan Sejauh Mana Hukum Tersebut Mampu Menjaga Identitas Lokal dalam Konteks Globalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "peran" berarti penampilan dalam sandiwara, pemberi lawakan dalam pertunjukan, atau serangkaian tingkah laku yang diharapkan dari seseorang dengan posisi di masyarakat. Dalam bahasa Inggris, "peran" diterjemahkan sebagai "role," yang berarti tugas atau kewajiban dalam suatu pekerjaan atau tanggung jawab. Secara terminologi, "peran" merujuk pada kumpulan tingkah laku yang diharapkan dari individu yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat.

Menurut Barbara Kozier, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan orang lain sesuai dengan kedudukan seseorang dalam suatu sistem, dipengaruhi oleh keadaan sosial dan bersifat stabil. Teori peran oleh Bauer dan Jeffrey (2003) dalam buku "Role Ambiguity And Role Clarity" memberikan kerangka konseptual dalam studi perilaku di organisasi, dengan menyatakan bahwa peran melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

Soerjono Soekanto menyatakan dalam "Sosiologi Suatu Pengantar" bahwa peran adalah proses dinamis kedudukan (status), di mana seseorang menjalankan suatu peranan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, karena keduanya saling tergantung.

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah. Istilah "kebiasaan" berasal dari bahasa Belanda "gewoonte," sementara "adat" berasal dari bahasa Arab "adah" yang berarti kebiasaan. Dalam ilmu hukum, kebiasaan dan adat dibedakan, terutama dalam konteks pemakaian dan sejarah istilah di Indonesia. Hukum kebiasaan/adat terbagi menjadi hukum tidak tertulis dan tertulis, di mana di Belanda keduanya disebut hukum kebiasaan (gewoonterecht) yang berhadapan dengan hukum perundangan (wettenrecht). Istilah "hukum adat" berasal dari bahasa Arab "huk'm" (perintah) dan "adah" (kebiasaan). Di Indonesia, hukum adat diartikan sebagai hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam perundang-undangan dan mengandung unsur agama. Meskipun adat dan hukum adat sering disamakan, keduanya adalah lembaga yang berbeda. Adat dianggap sebagai tradisi lokal tanpa sanksi riil, sementara hukum adat terkait dengan dosa adat yang melibatkan pantangan (tabu) dan kutukan (kualat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala. Meskipun istilah adat diartikan sebagai kebiasaan, Van Dijk menyatakan bahwa hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, sedangkan Soejono Soekanto menganggap hukum adat sebagai kebiasaan yang memiliki akibat hukum. Hukum adat merupakan persambungan tali antara masa lalu dan masa kini, terlihat dari

perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Syekh Jalaluddin menjelaskan bahwa hukum adat tidak terletak pada peristiwa itu sendiri, melainkan pada apa yang tidak tertulis di balik peristiwa tersebut, yaitu ketentuan keharusan yang mengatur tautan antar peristiwa.

Hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang membentuk suatu sistem dengan sanksi riil. Berbagai pandangan dari para ahli menunjukkan bahwa hukum adat melibatkan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku, memiliki sanksi, dan belum dikodifikasikan. Hukum adat dapat dilihat dari keputusan-keputusan masyarakat, keputusan fungsionaris hukum, atau nilai-nilai keadilan rakyat. Unsur-unsur hukum adat termasuk tingkah laku yang terus-menerus, teratur dan sistematis, nilai sacral, keputusan kepala adat, sanksi, dan ketaatan dalam Masyarakat Manusia, alam, arwah nenek moyang, dan makhluk lainnya merupakan fokus pemujaan, terutama terhadap arwah nenek moyang yang dianggap sebagai pelindung adat yang esensial untuk kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan bersama, seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam, dan peristiwa penting lainnya, selalu disertai upacara religius. Tujuannya adalah agar maksud dan tujuan mendapat berkah, tanpa halangan, dan selalu berhasil dengan baik.

Hukum adat juga mencerminkan karakter komunal, di mana kehidupan manusia dipandang sebagai sebuah kesatuan kelompok yang utuh. Manusia dianggap sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam perspektif ini, kepentingan bersama diutamakan daripada kepentingan individu, dan kehidupan berkelompok dianggap sebagai prinsip utama. Ide demokrasi tercermin dalam hukum adat, di mana segala keputusan dibuat melalui rasa kebersamaan. Prinsip permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan tercermin dalam hukum adat, dengan mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, proses musyawarah di balai desa dan tindakan pamong desa didasarkan pada hasil musyawarah. Selain itu, ada pula hukum adat yang bersifat konkret dan kontan. Sifat kontan berkaitan dengan pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban yang dilakukan secara bersamaan, seperti penyerahan dan penerimaan yang harus terjadi serentak. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial. Di sisi lain, sifat konkret menekankan pentingnya adanya tanda yang terlihat, seperti penggunaan benda-benda nyata untuk menyatakan setiap tindakan atau keinginan dalam suatu hubungan hukum. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan saling curiga di antara pihak yang terlibat.

Ciri-ciri hukum adat menurut Prof. Koesnoe mencakup bahwa hukum adat umumnya bersifat tidak tertulis, norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas perikehidupan dalam masyarakat, asas-asas dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, cerita-cerita, dan perumpamaan, kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam berbagai urusan, faktor-faktor kepercayaan atau agama tidak bisa dipisahkan, dan ketaatan melaksanakannya didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat. Sifat-sifat hukum adat mencakup bahwa hukum adat bersifat tradisional (turun temurun), religius (berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), mengutamakan kebersamaan, dan bersifat konkret (nyata, berwujud, dan maknanya jelas). Budaya lokal atau kearifan lokal didefinisikan sebagai budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Ciri-ciri budaya lokal mencakup keterkaitan dengan lingkungan, diwariskan dari generasi ke generasi, merinci nilai-nilai positif, memiliki ciri khas yang berbeda, dan mengandung makna yang dalam. Manfaat dari budaya lokal mencakup pembangunan identitas, pelestarian warisan budaya, peningkatan pariwisata, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tantangan hukum adat dalam pemeliharaan budaya lokal dapat diartikan sebagai rintangan atau hambatan yang muncul dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal oleh masyarakat. Pengertian "tantangan" dalam konteks ini merujuk pada hal atau objek yang menghambat proses pelaksanaan aturan hukum atau nilai-nilai adat. Dalam artikel ini, dibahas beberapa tantangan utama, antara lain pengakuan hukum terhadap hukum adat, dampak modernisasi dan globalisasi, konflik lahan dan sumber daya alam, pelestarian pengetahuan tradisional, konflik antar-generasi, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, serta akses terbatas ke sumber daya dan pendanaan.

Upaya pemeliharaan budaya lokal melalui hukum adat dihadapkan pada beberapa tantangan umum. Salah satunya adalah pengakuan hukum terhadap hukum adat, di mana seringkali hukum adat tidak diakui atau diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Modernisasi dan globalisasi juga dapat menghambat pemeliharaan budaya lokal karena dampaknya yang cepat terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Konflik lahan dan sumber daya alam, pelestarian pengetahuan tradisional, konflik antar-generasi, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, serta akses terbatas ke sumber daya dan pendanaan menjadi tantangan serius dalam upaya melestarikan budaya lokal. Hukum adat, meskipun hidup dalam kesadaran masyarakat, sulit dilaksanakan pada hukum nasional karena bersifat tidak tertulis. Beberapa tantangan yang muncul setelah pembuatan hukum modern termasuk penggeseran hukum adat yang dianggap primitif, sehingga dianggap tidak memberikan jaminan dalam kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum adat tetap dapat digunakan dalam pelestarian budaya lokal karena menekankan adat-adat yang telah ada.

Tantangan dalam pemeliharaan budaya lokal melibatkan konteks budaya, hukum, dan sosial, dan berbagai aspek seperti pengakuan hukum, dampak modernisasi, konflik lahan, pelestarian pengetahuan tradisional, konflik antar-generasi, kebijakan pemerintah, dan keterbatasan akses ke sumber daya dan pendanaan. Hukum adat memiliki peran penting dalam upaya ini, terutama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya serta memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang diatur oleh hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Melalui pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam tulisan ini meliputi:

1. Dampak perubahan sosial terhadap pola waris adat di Indonesia adalah fenomena kompleks yang mencakup urbanisasi, globalisasi, dan perubahan nilai. Urbanisasi mengubah struktur keluarga dan norma-norma tradisional, sedangkan globalisasi membawa perubahan budaya yang signifikan. Perubahan nilai juga mempengaruhi pandangan terhadap peran gender dan nilai-nilai tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial berpotensi menggeser pola waris adat dan menghadirkan tantangan terkait dengan nilai-nilai yang mendukung atau menentang tradisi waris adat.
2. Pergeseran nilai-nilai yang mendukung atau menentang tradisi waris adat terjadi sebagai hasil interaksi kompleks antara perubahan sosial, budaya, dan hukum. Contohnya, dalam masyarakat adat Bali, terdapat pergeseran nilai adat yang dianggap wajar apabila tidak terlalu menentang peraturan adat. Ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan nilai dan norma yang terjadi seiring waktu. Pergeseran nilai juga dipengaruhi oleh dinamika hukum waris adat, seperti pergeseran sistem pewarisan dari patrilineal ke arah individual. Oleh karena itu, pemahaman yang holistik terhadap dinamika nilai dan hukum dalam konteks waris adat menjadi krusial.

Hukum adat diakui di Indonesia sebagai hukum tambahan selain hukum nasional, menjadi simbol penghormatan terhadap masyarakat adat, suku, dan keberagaman budaya. Budaya lokal adalah warisan khas setiap suku, dan pelestarian budaya ini tergantung pada pelestarian hukum adat. Hukum adat dapat menjadi identitas suatu masyarakat adat, memberikan ciri khas yang dapat dikenali dan dihormati oleh masyarakat lain, termasuk daya tarik bagi wisatawan.

Dalam praktiknya, hukum adat menghadapi tantangan, seperti perkembangan teknologi yang merubah kebiasaan lokal, pergantian gaya hidup masyarakat yang tidak mendukung hukum adat di era modern, dan perubahan regulasi hukum yang dapat mengancam eksistensinya. Globalisasi juga membawa variasi gaya hidup yang sulit dipertahankan melalui hukum adat. Pemanfaatan sumber daya alam oleh pemerintah dapat mengancam budaya lokal. Pelestarian hukum adat dapat terwujud jika lembaga penegak hukum fokus pada keberlakuan hukum positif tanpa mengesampingkan kepentingan hukum adat. Meskipun globalisasi tidak dapat dihindari, lembaga penegak hukum dapat mempertimbangkan hukum adat untuk menjamin pelestariannya. Dalam beberapa kasus, penegak hukum, termasuk hakim, seharusnya mempertimbangkan nilai-

nilai masyarakat adat sesuai Undang-Undang kekuasaan kehakiman, asalkan tidak bertentangan dengan hukum positif. Dengan demikian, pelestarian kebudayaan lokal dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *RechtIdee*, 16(1), 65-87.
- Lauren, C. C. (2023). Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 874-884.
- Mustomi, O. (2017). Perubahan tatanan budaya hukum pada masyarakat adat Suku Baduy Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN*, 2579, 8561.
- Muzainah, G. (2016). *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Pustaka Akademika.
- Sutardi, T. (2007). *Antropologi: Mengungkap keragaman budaya*. PT Grafindo Media Pratama.
- Wahyudani, Z., & Firdaus, M. (2022). Faktor-Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh, Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 13-33.
- Gischa, S. (2023, Juni 7). Pengertian Peran Menurut Ahli. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli?page=all>